Vol 2 No 4, November 2023, pp 442-449 https://doi.org/10.59025/js.v2i4.115

Jurnal Masyarakat Madani Indonesia
e-ISSN: 2829-6702
https://syadani.onlinelibrary.id/

Sosialisasi Politik Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024

Ismed Kelibay[1], Kamaluddin[1], Siti Nurjannah[1], Muhammad Arifin Abdul Kadir[1], Rusdi[1], Mohamad Saleh Refra[1], Rosnani[1], Miryam Diana Kalagison[1], Laila Qadriyani Malikin Rumakat[1], Irwan Boinauw[1]

[1]*Universitas Muhammadiyah Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia*
Corresponding author email: imm.ismed92@gmail.com

INFO ARTIKEL

Diterima: 21 Agustus 2023
Direvisi: 10 September 2023
Disetujui: 20 September 2023

***Keywords*:**

Sosialisasi Politik, Partisipasi Masyarakat, Pemilu 2024

ABSTRAK

Partisipasi politik masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasangan calon yang akan dipilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan menentukan pilihannya. Maka dari itu, kegiatan sosialisasi merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat agar semakin sadar akan pentingnya pasrtisipasi dan keterlibatannya dalam pemilu. Metode yang digunakan, yaitu Tim PKM terlebih dulu melakukan koordinasi serta observasi awal melalui pertemuan dengan Kepala Kampung Teluk Dore dengan tujuan agar Tim memperoleh informasi yang dibutuhkan pada kegiatan sosialisasi. Hasil yang didapatkan pada kegiatan PKM kali ini sangat baik, diketahui bahwa saat ini masyarakat Kampung Teluk Dore yang berada di wilayah Kabupaten Sorong tersebut telah menunjukkan tingkat partisipasi politik yang signifikan menjelang Pemilu di tahun 2024 mendatang. Hal tersebut sesuai hasil capaian pemilu pada tahun 2017 untuk Kabupaten Sorong secara keseluruhan hanya mencapai 67.3%, sedangkan target nasional adalah sebesar 77%. Selanjutnya pada pemilu tahun 2019 tingkat capaian masyarakat menjadi 85%, tentu hasil tersebut menjadikan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Sorong semakin meningkat lebih baik. Dari hasil tersebut disimpulkan, bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dapat ditempuh dengan cara diantaranya: melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui Ketua RT masing-masin. Mengadakan perekrutan relawan demokrasi untuk memaksimalkan program pengawalan pemilu; dan memasifkan penggunaan media sosial dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang mekanisme dan tahapan pemilu

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Copyright@ Author (2023).

1. PENDAHULUAN

Partisipasi politik di Indonesia saat ini sangat dinamis, khususnya warga negara yang ikut berpartisipasi aktif dalam setiap pemilu yang berlangsung di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) yang menilai, bahwa ada tiga faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, yaitu terbatasnya pilihan pasangan calon dari yang diajukan partai politik; terdapat perbedaan antara janji kampanye dengan

realitas politik; dan menurunnya aktivitas sosialisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat oleh Penyelenggara Pemilu [10]. Dari seluruh faktor penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat sebagai pemilih tersebut, hal ini sebenarnya menjadi tanggungjawab seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pemilu. Oleh sebab itu, Sosialisasi merupakan usaha yang dilakukan untuk menyampaikan informasi dan sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta menjadikan setiap pribadi lebih sadar akan pentingnya pasrtisipasi dalam pemilu.

Pemilihan Umum (Pemilu) telah menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dapat dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [9][8]. Selain itu, peraturan perundang-undangan juga telah menyebutkan, bahwa pemilu dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil [6]. Pemilu memang telah diakui secara global dan merupakan sebuah solusi atas pembentukan demokrasi perwakilan dan juga menjadi solusi untuk pergantian pemerintahan secara berkala [2].

Pemilu kini menjadi pilar utama dalam demokrasi sebagai upaya perwujudan atas kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang merupakan hasil dari pemilu yang demokratis itulah yang akan menjadi tolak ukur untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang baik, dimana rakyat secara langsung ikut terlibat serta aktif dalam menentukan arah kebijakan politik suatu negara selama 5 tahun ke depan. Partisipasi politik memiliki pengaruh dan merupakan legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam pemilu, partisipasi politik memiliki pengaruh yang besar atas legitimasi masyarakat terhadap pasangan calon yang terpilih dalam pemilu. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan menentukan pilihan mereka dalam pemilihan umum. Bisa dikatakan, bahwa masa depan kemajuan suatu daerah dapat terwujud tergantung pada keputusan masyarakat untuk memilih pemimpin yang dipercaya mampu mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat selama satu periode atau 5 tahun ke depan. Olehnya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum (Pemilu) ini memiliki peranan yang sangat besar dan dapat dipandang sebagai bagian terpenting dari kontrol masyarakat terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Kontrol yang diberikan sangatlah beragam, hal tersebut tergantung pada tingkat partisipasi politik masyarakat disetiap daerah masing-masing. Sebagai bagian penting dalam demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara [1].

Tujuan utama dilakukannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, mengingat masyarakat merupakan faktor penentu dalam penyelenggaraan pemilu. Seperti yang diketahui, bahwa partisipasi politik masyarakat di Kampung Teluk Dore masih terbilang rendah, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari masyarakat yang sudah dianggap memiliki hak suara namun masih kurang peka terhadap dinamika Pemilu. Melalui kegiatan PKM ini, agar dapat memberikan informasi dan juga pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya pasrtisipasi masyarakat dalam pemilu maupun pemilukada. Oleh sebab itu, kegiatan seperti sosialisasi politik sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat menjelang pemilu sangatlah diharapkan. Hal ini mengingat, pada tahun 2024 mendatang, seluruh masyarakat Indonesia akan memulai sebuah era baru dalam demokrasi, yakni Pemilihan Umum (Pemilu) yang selenggarakan serentak di seluruh wilayah Indonesia, untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan Bupati dan Wakil Bupati [4].

Manfaat yang kemudian didapatkan dari kegiatan PKM ini, bahwa dengan adanya kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan tentang partisipasi politik, dapat menjadikan respon masyarakat yang dulunya rendah menjadi meningkat lebih baik. Dengan demikian, sosialisasi politik sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu haruslah intens dilakukan, hal ini merupakan bentuk perwujudan dalam negara demokrasi, dimana warga masyarakat dilibatkan langsung dalam pemilihan umum, maka hak setiap warga negara memiliki peranan yang sangat penting untuk ikut menseleksi setiap pejabat negara yang nantinya akan dipilih untuk menjalankan pemerintahan selama 5 tahun ke depan [5].

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) kali ini, metode yang digunakan yaitu Tim PKM terlebih dahulu melakukan koordinasi serta observasi awal melalui pertemuan dengan Kepala Kampung Teluk Dore untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Tentu hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang nantinya akan dilakukan. Selanjutnya, pada Kegiatan PKM kali ini juga terbagi dalam 3 (tiga) tahap, yakni Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, dan terakhir adalah Tahap Evaluasi, yang diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1 Tahap Persiapan

Sebuah kegiatan yang hendak dilaksanakan tentu membutuhkan persiapan yang matang agar setiap kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Adapun tahap persiapan yang pertama, Tim terlebih dahulu menentukan lokasi sebagai sasaran dalam kegiatan PKM, hal ini mengingat distribusi Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ke lokasi pelaksanaan kegiatan PKM dengan menempuh jarak yang cukup jauh, maka lokasi merupakan faktor penting atas ketercapaian Program PKM yang dilaksanakan. Kedua, agar kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan juga efektif, maka perlu adanya suatu koordinasi yang intensif, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi miss komunikasi antar semua pihak, dan ketiga atau tahap terakhir dalam persiapan adalah kebutuhan materi nantinya akan direalisasikan. Tujuan dilakukannya PKM ini, agar upaya masyarakat dalam memilih Kandidat atau calon Pemimpin yang akan merealisasi apa yang menjadi aspirasi masyarakat di daerah selama satu periode atau selama 5 tahun ke depan menjadi lebih baik.

2.2 Tahap Pelaksanaan

Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini ketika lokasi atau sasaran yang telah diidentifikasi sebelumnya pada observasi awal dan dengan persiapan yang telah sesuai, maka selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

2.3 Tahap Evaluasi

Tahap yang terakhir adalah evaluasi. Tahap evaluasi sangat penting dilakukan, hal tersebut mengingat efektifitas atas pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai sasaran utama dalam kegiatan PKM. Maka, pada tahap evaluasi dapat dilakukan dengan 2 langkah, yaitu pertama, dilakukan mulai dari persiapan hingga pada pelaksanaan kegiatan; dan kedua, dilakukan di akhir pelaksanaan kegiatan PKM. Hal ini bertujuan

untuk mengetahui segala hal yang menjadi point atau hasil dari persiapan hingga pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukkan dan juga untuk memperbaiki segala hal yang menjadi kekurangan yang ada, demi keberlanjutan dari program PKM yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik, terarah, efektif, dan juga efisien.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) tentang Sosialisasi Politik sangat penting dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat serta untuk menumbuhkan partisipasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Dengan dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi ini, manfaat yang diharapkan adalah mampu meningkatkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilih masyarakat dalam pemilihan umum (Pemilu), hal tersebut karena merupakan bentuk partisipasi politik masyarakat dalam proses demokrasi serta menjadikan sebuah solusi untuk menentukan arah pemerintahan yang berkemajuan, jujur, dan juga berkeadilan.

3.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan pada pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Sebelumnya, Tim terbagi dalam 2 kelompok dengan 2 (dua) Tema kegiatan diantaranya: “Peran Aparat Kampung Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung Teluk Dore Distrik Makbon Kabupaten Sorong” sebagai tema utama dalam kegiatan PKM dan tema kedua yaitu “Sosialisasi Politik Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024”. Kemudian, seluruh Tim melakukan berbagai persiapan sebelum melaksanakan kegiatan PKM, yaitu kembali berkoordinasi dengan Kepala Kampung Teluk Dore Distrik Makbon Kabupaten Sorong serta menyerahkan surat izin pelaksanaan kegiatan PKM kepada Kepala Kampung Teluk Dore.

Gambar 1 Tim PKM melakukan Koordinasi bersama Kepala Kampung Teluk Dore Distrik Makbon Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya

Selanjutnya, 2 hari sebelum pelaksanaan kegiatan PKM, Tim kembali melakukan koordinasi bersama Kepala Kampung Teluk Dore terkait tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan telah disepakati bersama, bahwa kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Gedung Balai Pertemuan Kampung Teluk Dore Distrik Makbon Kabupaten Sorong, dengan sasaran yang ditujuh adalah masyarakat setempat secara umum yang akan menggunakan hak suaranya menjelang Pemilu serentak tahun 2024 mendatang.

3.2 Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap ini, seperti yang diketahui, bahwa setelah pelaksanaan kegiatan pada tema utama Pengabdian Kepada Masyarakt (PKM), yakni tentang "Peran Aparat Kampung Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung Teluk Dore Distrik Makbon Kabupaten Sorong", kemudian Tim melanjutkan dengan tema kegiatan kedua, yaitu "Sosialisasi Politik Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024". Pada Kegiatan Sosialisasi tersebut, Tim menyampaikan tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan berlangsung di Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Seperti yang diketahui, bahwa tahun 2024 akan menjadi era baru dalam Demokrasi di Indonesia, Pemilu yang sebelumnya dilaksanakan secara terpisah di setiap daerah, kini pada tahun 2024 secara serentak akan diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia.

Pemilihan Umum (Pemilu) serentak ini dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024. Kemudian, untuk memilih (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024 [4]. Secara umum partisipasi masyarakat merupakan salah satu ukuran atau parameter untuk mengukur keberhasilan Pemilu dan Pilkada di daerah. Secara kuantitatif, keberhasilan Pilkada dapat diukur dari partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Sedangkan secara kualitatif, dapat diukur dari pilihan rasional *(rational choice)* dan peran aktif masyarakat dalam mengikuti dan mengawal tahapan pemilu. Masyarakat yang menentukan pilihannya didasarkan oleh pertimbangan terhadap kemampuan parpol atau kandidat tertentu dengan melihat visi-misi, rekam jejak, dan program kerjanya yang langsung menyentuh di masyarakat.

Gambar 2 Sosialisasi Tentang Partisipasi Masyarakat Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan Tim PKM kali ini telah memperoleh hasil yang sangat baik, diketahui bahwa saat ini masyarakat Kampung Teluk Dore yang berada di wilayah Kabupaten Sorong tersebut telah menunjukkan tingkat partisipasi politik yang signifikan menjelang Pemilu di tahun 2024 mendatang. Hal tersebut sesuai dengan hasil capaian pemilu pada tahun 2017 yakni hanya mencapai 67.3%, sedangkan target nasional adalah sebesar 77%. Selanjutnya pada pemilu tahun 2019 tingkat capaian masyarakat menjadi 85%. Dari hasil tersebut dapat diketahui, bahwa terjadi kenaikan tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Sorong menjadi lebih baik. Selain itu, selama kegiatan sosialisasi berlangsung, telah mendapat respon positif dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2 di atas, bahwa masyarakat sangat antusias dalam bertanya, dengan tujuan agar masyarakat dapat memperoleh informasi dan juga pengetahuan yang lebih baik tentang keterlibatan atau partisipasi

masyarakat dalam mengikuti pemilu pada tahun 2024 mendatang.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dapat ditempuh dengan cara membangkitkan minat pemilih pemula terhadap Pemilu terlebih dahulu. Koordinator Pusat Peneliti Politik LIPI, Sarah Nuraini Siregar menyebut, bahawa terdapat sekitar 35% sampai 40% pemilih dalam Pemilu tahun 2019, atau jumlahnya sekitar 80 juta dari 185 juta merupakan pemilih yang didominasi generasi milenial. Olehnya itu, yang diperlukan KPU saat ini adalah melakukan sosialisasi tentang tata cara pemilihan dengan metode dan media yang sesuai dengan karakteristik generasi muda saat ini. Pendidikan politik bagi pemilih pemula dapat dilakukan dengan metode, media, dan substansi yang sesuai, hal itu juga dapat dilakukan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil agar generasi muda tidak hanya menggunakan hak pilihnya saja, melainkan dapat memiliki sejumlah alasan dan pertimbangan atas partai politik dan/atau nama calon yang dipilih nantinya. Sebaliknya, sebagai peserta pemilihan, baik partai politik, calon pemimpin pusat dan daerah juga perlu melakukan kampanye cerdas bagi generasi muda sehingga kesadaran politik mereka akan terbangun sejak dini [7].

Gambar 3 Foto Bersama Tim PKM dan Masyarakat Kampung Teluk Dore

Partisipasi masyarakat sangatlah penting, tentu hal tersebut akan menjadi pengalaman pertama bagi masyarakat khususnya masyarakat Kampung Teluk Dore, mau dan tidak mau masyarakat harus terlibat aktif karena merupakan upaya masyarakat dalam memilih orang-orang yang dianggap layak untuk menjadi Pemimpin Pemerintahan di daerahnya. Terpilihnya calon kandidat sangatlah bergantung pada partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan. Karena hal tersebut akan menjadi bentuk persetujuan masyarakat atas kekuasaan yang akan diperoleh dari hasil pemilihan. Masyarakat memiliki kuasa penuh untuk menentukan pilihannya, maka masyarakat secara leluasa dapat memilih pemimpin sesuai dengan kriteria dan preferensi masing-masing.

Terdapat beberapa persoalan klasik yang sering menjadi penyebab menurunnya angka partisipasi secara teoritik diuraikan [3], mengemukakan bahwa partisipasi politik masyarakat sangat ditentukan oleh beberapa hal antara lain, Pertama, *political literacy* (melek politik), masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan akan politik ini cenderung tidak mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaga politik sebagai sebuah sistem. Pada akhirnya, masyarakat yang tidak memiliki *stock of knowledge* politik yang memadai akan mendorong sikap acuh tak acuh, tidak peduli dan masa bodoh terhadap setiap proses politik dan pemilu; Kedua, muncul anggapan bahwa tidak ada dampak signifikan yang ditimbulkan dari proses politik dan Pilkada, khususnya bagi kehidupan sosial-ekonomi; Ketiga, seiring dengan maraknya kampanye negatif, kampanye hitam (hoaks), ujaran

kebencian, praktik politik uang, suap, dan sogok serta intoleransi yang menyertai Pemilu dan Pilkada, maka keduanya seringkali dianggap tidak mengajarkan pendidikan politik tentang kejujuran dan keadilan (jurdil); Keempat, karena menurunnya kepercayaan masyarakat kepada parpol yang kemudian menyebabkan lemahnya relasi pemilih dengan partai politik. Karena, program dan *platform* yang tidak jelas mengakibatkan Parpol tidak mempunyai masyarakat akar rumput. Selain itu, hanya menjelang pemilu ataupun pilkada saja barulah para Parpol dengan berbagai cara untuk mendekati dan berinteraksi dengan masyarakat; Kelima, sistem pemilihan yang belum memberikan kemudahan bagi masyarakat. Misalnya, banyaknya jenis surat suara, besarnya ukuran surat suara, pindah domisili terancam tidak bisa memilih, singkatnya waktu memilih, penggunaan KTP-el yang masih bermasalah, undangan memilih, dan lain sebagainya. Agar warga tidak malas datang ke tempat pemungutan suara dan mudah untuk menyalurkan hak pilihnya maka sudah seharusnya aturan memilih harus dibuat sesederhana mungkin; dan Keenam atau yang terakhir, adalah meningkatnya angka golput dapat dimaknai sebagai fenomena protes *voting*. Gejala ini saling terkait dengan tiga faktor terakhir di atas. Perilaku masyarakat dalam Pemilu/Pilkada di Indonesia bukan merupakan kewajiban yang ada sanksinya, melainkan merupakan hak dari setiap warga negara yang memenuhi syarat sesuai undang-undang yang berlaku [3].

4. KESIMPULAN

Partisipasi politik masyarakat di Kampung Teluk Dore Distrik Makbon Kabupaten Sorong dalam pemilu telah meningkat lebih baik. Dengan adanya sosialisasi yang sering dilakukan pihakpenyelenggara pemilu kepada masyarakat, tentu akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterlibatannya dalam pemilu. Dengan demikian, adanya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi Penyelenggara Pemilu Kabupaten Sorong dalam pelaksanaan tahapan pemilu dan sebagai tolak ukur bagi setiap Penyelenggara lain di daerah dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat menjelang pemililihan umum tahun 2024 mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), khususnya kepada Pemerintah Kampung Teluk Dore Distrik Makbon Kabupaten Sorong dan juga kepada masyarakat setempat. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Universitas Muhammadiyah Sorong yang telah memfasilitasi Tim PKM, sehingga kegiatan PKM yang dilakukan berjalan dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Arry Dharmawan. “Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu”. *Jurnal Wacana Politik* Vol. 1, No. 2. Hlm 1. 2016. https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11056

[2] F. A. Prasetyo, and F. ., "Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2017," *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 7, no. 04, pp. 301-310. 2018. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21961

[3] Hertanto. Partisipasi Pemilih Tantangan Pemilu dan Pilgub. 2017. http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/18427

[4] Kelibay, I., Boinauw, I., Rosnani, R., & Kalagison, M. D. Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, *7*(2), 167–181.2022. https://doi.org/10.33506/jn.v7i2.1739

[5] Kelibay, I., Boinauw, I., Kamaluddin, K., Kadir, M. A. A., & Rosnani, R. Sosialisasi Pendidikan Politik Pada Pemilih Pemula (Siswa/Siswi Sma Kelas Xii) Di Kota Sorong Pada Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jurnal Abdi Insani*, *10*(2), 654-660. 2023. https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v10i2.936

[6] Nurkinan, N. Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019. *Jurnal Politikom Indonesiana*, *3*(1), 26. 2018. https://doi.org/10.35706/jpi.v3i1.1409

[7] _____.Hasil Survei LIPI: 40 Persen Suara di Pemilu Didominasi Milenial Ilustrasi Kotak suara KPU. Antaranews.com. Diakses pada 23 september 2023. https://tirto.id/hasil-survei-lipi-40-persen-suara-di-pemilu-didominasi-milenial-dbGF. 2018

[8] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemilihan Umum

[9] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

[10] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.